

Judul : Program Hilirisasi Nikel Disorot Dunia : Kita Jangan Mau Diatur IMF
Tanggal : Minggu, 09 Juli 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 6

Program Hilirisasi Nikel Disorot Dunia

Kita Jangan Mau Diatur IMF

Senayan menyesalkan rekomendasi Dana Moneter Internasional (IMF) yang terkesan mencampuri kebijakan hilirisasi nikel di Indonesia. Pemerintah diminta tetap konsisten tidak mengekspor mineral mentah.

ANGGOTA Komisi VII DPR Rotik Hananto menilai, rekomendasi IMF agar Pemerintah Indonesia menghentikan kebijakan pembatasan ekspor nikel sangat tidak tepat dan tidak solutif. Jika ekspor bijih nikel dibuka, tidak ada lagi mekanisme yang menjamin pasokan bijih nikel untuk *smelter* dalam negeri.

"Hal ini (pembukaan ekspor bijih nikel) akan melemahkan semangat industri menjalankan arah dan visi hilirisasi yang kita cita-citakan. Pemerintah jangan mau diatur IMF," tegas Rotik, kemarin.

Seperti diketahui, IMF mengeluarkan dokumen *Executive Board Concludes 2023, Article IV Consultation with Indonesia* (25/6). Dalam laporannya, IMF memberikan catatan terkait program hilirisasi nikel di Indonesia.

Isinya tentang potensi pen-

dapatan negara yang hilang dari nilai ekspor, keraguan terhadap keberhasilan upaya hilirisasi nikel. Kemudian, rekomendasi untuk menghentikan kebijakan tersebut secara bertahap dan tidak merambat ke sumber daya lainnya.

Rotik menilai, laporan IMF ini sudah terlalu mencampuri kebijakan hilirisasi nikel di Indonesia.

"Program hilirisasi nikel kita memang tidak memuaskan. Tetapi solusinya bukan dengan membuka ekspor kembali," tegas anggota Fraksi PKS ini.

Pelarangan ekspor nikel ini, lanjutnya, untuk memastikan bahwa proses peningkatan nilai tambah atas sumber daya mineral berjalan baik di dalam negeri. Dengan begitu, Indonesia tidak mengekspor mineral dalam bentuk mentah.

"Kebijakan hilirisasi nikel ini mendatangkan kemakmuran

sebesar-besarnya bagi masyarakat dan meningkatkan pendapatan negara dari program hilirisasi mineral kita," katanya.

Rotik juga meminta agar rekomendasi IMF ini dijadikan bahan evaluasi untuk meningkatkan tata kelola program hilirisasi nikel di dalam negeri. Dengan cara memperbaiki harga bijih nikel di dalam negeri, mengurangi insentif kepada investor asing yang selama ini diobral tanpa pertimbangan ekonomi dan sosial. Juga, memperkuat kemampuan pengusaha nasional dalam membangun *smelter*.

"Termasuk menyiapkan peta jalan pohon industri, dan mulai membangun industri hilirisasi yang dapat menyerap lebih banyak lagi hasil produksi *smelter*," ucap Rotik.

Anggota Komisi VII DPR Mulyanto meminta Pemerintah menindak tegas para pelaku ekspor sebanyak lima juta ton bijih nikel ke China. Tindakan para eksportir ini jelas ilegal, lantaran melanggar aturan ekspor bijih nikel yang tertuang dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

"Pemerintah harus segera memproses perusahaan eksportir tersebut karena jelas-jelas sudah merugikan negara triliunan rupiah. Tunggu apalagi, segera pidanakan," seru Mulyanto.

Dia menduga, praktik ekspor ilegal ini dilakukan oleh jaringan yang melibatkan perusahaan swasta, oknum Pemerintah, dan oknum lembaga pengawasan ekspor. Sangat tidak mungkin lembaga pemberi ekspor tidak tahu adanya ekspor ilegal ini. Apalagi, angka yang diekspor tidak main-main, mencapai lima juta ton. Jumlah yang sangat besar.

"Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi harus segera mengambil tindakan. Begitu juga kepolisian dan KPK harus segera memeriksa lembaga pengawas ekspor yang diduga main mata ini," desak anggota Fraksi PKS ini.

Mulyanto bilang, menelusuri para pelaku ekspor ini sebenarnya sangat mudah. Sebab, kegiatannya dilakukan melalui

pelabuhan-pelabuhan resmi. Dokumen dan data ekspor pun bisa dengan mudah ditelusuri.

"Masalahnya, mau tidak kepolisian memeriksa oknum pejabat yang menjadi beking ekspor ilegal ini. Jumlah mineral yang diekspor sangat besar, tentu bekingnya bukan orang sembarangan," katanya.

Mulyanto mengatakan, harusnya ekspor ilegal sangat tidak mungkin terjadi dengan banyaknya pihak yang melakukan pengawasan. Seperti, Badan Keamanan Laut (Bakamla), Direktorat Bea Cukai, Polisi Air dan Udara (Polairud), hingga Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP).

Upaya penelusuran para pelaku ini, lanjutnya, sangat penting untuk memastikan jangan sampai kegiatan ekspor ilegal ini justru dibiarkan.

"Negara dirugikan dengan ekspor nikel ilegal. Sedangkan hilirisasi nikel setengah hati. Ekspor Nickel Pig Iron (NPI) dan Feronikel tidak menghasilkan penerimaan negara yang memadai. Namun, terjadi kebocoran ekspor," ujarnya. ■ KAL